

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ISLAM PARTAI
ACEH DALAM PEMENANGAN PILKADA 2017
(STUDY KASUS KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

OLEH:

**ZULFIKAR
NIM: 3012014046**

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Dakwah**

Diajukan Oleh :

ZULFIKAR

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Nomor Pokok : 3012014046**

Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
NIP. 19571010 198703 1 002

Pembimbing II,



Bahtiar, MA

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pada hari/tanggal:

Kamis, 22 Februari 2018 M
07 Jumadil Akhir 1439 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua



Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
Nip. 19571010 198703 1 002

Sekretaris



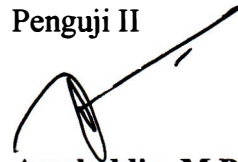
Bahtiar, MA
Nip.

Penguji I



Drs. Zakaria AB, MM.
Nip. 19560413 198603 1 004

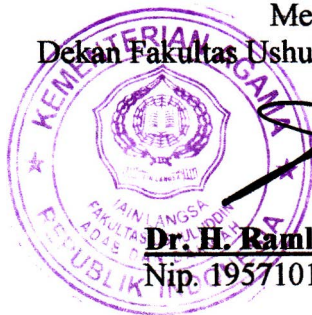
Penguji II



Awaluddin, M.Pd
Nip.

Mengethui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA
Nip. 19571010 1987203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULFIKAR**
Nim : 3012014046
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran
Islam
Alamat : Desa Matang Rayeuk, Kec. Peudawa, Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "***Strategi Komunikasi Politik Islam Partai Aceh Dalam Pemenangan Pilkada 2017 (Study Kasus Kota Langsa)***" adalah benar hasil karya saya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 30 Januari 2018

buat Pernyataan



ZULFIKAR

Nim: 3012014046

ABSTRAK

Dalam pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Kota Langsa, masih banyak terjadi kejanggalan atas kemenangan yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 dengan selisih menang hanya 2%. Tidak hanya itu, politik Islam yang digambarkan tidak terlihat dalam pilkada di Kota Langsa sehingga menjadi hal yang layak untuk dibahas dan dikaji terhadap strategi komunikasi politik Islam yang terjadi di Kabupaten Kota Langsa. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana strategi komunikasi politik Islam Partai Aceh dalam kemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa dan Apa hambatan komunikasi politik Islam Partai Aceh dalam kemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitik, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan dari observasi, wawancara dan dokumentasi agar dapat dibuat rangkuman/kesimpulan dari objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi komunikasi politik PA dalam kemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa dilakukan secara terencana. Proses perencanaan ini merupakan hasil dari mekanisme yang ada di partai terutama yang dilakukan oleh DPP PA. Komunikasi efektif yang dilakukan oleh partai politik berdampak signifikan pada perolehan suara partai dalam pemilu, karena ada faktor lain yang turut mempengaruhinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu siap membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah yaitu Bapak Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA.
2. Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yaitu Ibu Suparwany, MA.
3. Bapak Dr. H. Ramly M. Yusuf, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Bahtiar, MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih tiada taranya kepada kedua orang tua yakni Ayahanda dan Ibunda yang penulis banggakan dan sangat penulis sayangi dan cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis, terimakasih teramat dalam atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi langkah kaki penulis dimanapun penulis berada.

6. Sahabat-sahabat penulis yang selalu bersama, mendukung dan membantu dalam penulisan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

30 Januari 2018,

Zulfikar
NIM: 3012014046

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Maslah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Landasan Teori.....	10
G. Kajian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II : LANDASAN TEORITIS	17
A. Partai Politik.....	17
B. Pemilu	23
C. Strategi	27
D. Strategu Partai Aceh dalam Pemilu Legislatif	29
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Temuan Data.....	39

G. Tahap – Tahap Penelitian.....	42
H. Pedoman Penulisan	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambar Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Kota Langsa	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
1. Dasar Strategi Komunikasi Politik PA.....	47
2. Perencanaan Strategi Komunikasi Politik PA.....	50
3. Strategi Komunikasi Politik PA.....	53
BAB V : KESIMPULAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebagai negara dengan penduduk umat Muslim terbesar di dunia, tentu saja kekuatan politik Islam di Indonesia tidak bisa dinafikan. Negeri ini bahkan berpotensi menjadi poros kekuatan politik Islam dunia. Namun kondisi itu hanya bisa terjadi apabila terjadinya kesatuan dan persatuan umat Islam--misalnya dalam pesta demokrasi Pemilu yang akan datang. Seperti agama lain pada umumnya, Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Karena dalam Islam, pengaturan kehidupan bersama diatur dalam tata nilai *siyasah*. Jika politik, merujuk Salim Ali al-Bahnasawi, adalah suatu cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat regulasi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal merugikan bagi kepentingan manusia maka politik Islam memiliki maknanya sendiri. Merujuk suatu defenisi yang ditawarkan, politik Islam adalah aktivitas politik umat Islam yang menjadikan Islam sebagai nilai dan basis solidaritas berkelompok terutama politik di Aceh yang sistem pemerintahannya berlaku syari'at Islam.¹

Provinsi Aceh kembali menciptakan sejarah. Kali ini sukses menyelenggarakan Pemilu legislatif 2009 yang melibatkan partai politik lokal, selain partai politik nasional. Keikutsertaan partai lokal (parlok) dalam pemilu merupakan yang pertama kali dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sehingga

¹ Ramlan subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992). hlm. 116

pelaksanaan pesta demokrasi di daerah yang dijuluki “Serambi Mekkah” itu mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Hadirnya parlok di Aceh tidak lain adalah kekuatan politik baru karena sebelumnya rakyat Aceh sudah muak dan jenuh dengan partai politik berbasis nasional yang selalu saja dimenangkan kekuatan *status quo*. Selain itu rakyat Aceh juga sudah lelah dengan janji caleg parnas yang ujung-ujungnya hanya janji bukan bukti nyata bagi masyarakat. Pada masa-masa konflik pun parnas tidak memberi kontribusi signifikan buat masyarakat Aceh. Kehadiran sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), parnas di Aceh hanya formalitas politik belaka yang tidak dapat memberikan pengaruh apapun buat Aceh. Maka, kehadiran parpol lokal diharapkan bisa memberi perubahan general struktur perlemen yang selama ini kaku, berselemek korupsi, memperkaya diri serta tidak peduli nasib rakyat kecil. Parlok diharapkan mampu mengatur sistim ketatanegaraan negara yang selama ini amburadul.²

Pemerintah Aceh menegaskan, persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2017 di Aceh dan 20 kabupaten/kota, telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM, saat membacakan jawaban/penjelasan Gubernur Aceh terhadap pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2017. “Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa persiapan pelaksanaan Pilkada 2017, sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan,” tegas Dermawan.

² Rakhmad fadli zain “*Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Politik (Dalam Proses Perdamaian)*” skripsi program study ilmu politik universitas indonesia tahun 2009.

Dermawan menambahkan, terkait dengan dana penunjang tahapan pelaksanaan Pilkada, telah direalisasikan pada tahun anggaran 2016, sesuai Naskah Perjanjian Hibah (NPH) kepada tiga institusi, yaitu Komisi Independen Pemilihan Aceh yang bersifat demokrasi, bebas, merdeka dan berdiri sendiri, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda.³

Pilkada (Pemilihan kepala Daerah) dewasa ini semakin menuju ke arah yang lebih baik demi terwujudnya bangsa yang lebih terarah. Perubahan pola pemilihan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Perubahan-perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan adil dan bijaksana. Berjalannya reformasi pemilihan calon kepala daerah telah dilakukan secara langsung dan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 15 Februari 2017. Seiring perubahan sistem tersebut, Sistem-sistem pemilihan di Indonesia tentu saja berubah mengikuti undang-undang yang berlaku. Proses pemungutan suara ini dirasakan lebih baik daripada sebelumnya, meskipun ada yang perlu diperbaiki demi terwujudnya kehidupan yang demokratis.

Partai Aceh (PA) adalah salah satu partai yang mengusung kandidatnya dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Langsa. Sebagai salah satu partai politik yang mempunyai nama besar di wilayah provinsi Aceh, partai Aceh juga mempunyai peranan dalam mengkomunikasikan politik kepada simpatisan dan masyarakat, bergerak dalam lapangan politik untuk ikut mengatur ketatanegaraan. Maka strategi komunikasi politik yang digunakan harus tepat

³ [http: www.pilkadaacehtimur.com/](http://www.pilkadaacehtimur.com/) diakses tanggal 21 maret 2017.

sasaran sehingga perolehan suara yang didapat akan sesuai dengan yang diinginkan partai dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 ini.

Dengan menggunakan berbagai cara partai dan calon kepala daerah menyampaikan program-program kerja kepada sasarannya yaitu masyarakat, dengan berkampanye salah satu strategi partai untuk menarik masa dan simpatisan, melalui media masa serta turun langsung merupakan strategi komunikasi yang sering dilakukan baik partai maupun calon kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah atau pemilihan Calon Walikota dan wakil walikota di wilayah Kota Langsa di ikuti oleh Lima pasangan calon yang berasal dari independent dan yang diusung langsung oleh partai Aceh (PA). Berikut adalah daftar calon walikota dan wakil walikota Kota Langsa Provinsi Aceh yang ikut dalam proses pemilihan umum kepala daerah tahun 2017 yaitu pasangan calon walikota/wakil walikota Kota Langsa dengan nomor urut 1 adalah calon walikota/wakil walikota yang bertarung dari jalur perseorangan. Dengan nama calon walikota H. Asy'ari, S.P.dI,M.Pd dan nama calon wakil walikota Teuku Muhammad Nurdin, S.H.I, M.EI. Pasangan calon walikota/wakil walikota Kota Langsa dengan nomor urut dua adalah calon walikota/wakil walikota yang bertarung dari jalur parpol. Dengan nama calon walikota Hj. YUNIAR, SP, M.Si dan nama calon wakil walikota H. Heldiyansyah z. Mard, SE, M.AP.

Pasangan calon walikota/wakil walikota Kota Langsa dengan nomor urut tiga adalah calon walikota/wakil walikota yang bertarung dari jalur parpol. Dengan nama calon walikota Fazlun Hasan dan nama calon wakil walikota Syahyuzar Aka S.Sos. Pasangan calon walikota/wakil walikota Kota Langsa

dengan nomor urut empat adalah calon walikota/wakil walikota yang bertarung dari jalur parpol. Dengan nama calon walikota Usman Abdullah, SE dan nama calon wakil walikota Drs. H.Marzuki Hamid, MM. Pasangan calon walikota/wakil walikota Kota Langsa dengan nomor urut lima adalah calon walikota/wakil walikota yang bertarung dari jalur perseorangan. Dengan nama calon walikota Drs. Syaifuddin, H.Amin,MM dan nama calon wakil walikota Khairul Anwar, SH.MH.

Pemilihan Umum Wali Kota Langsa 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 untuk memilih Wali Kota Langsa periode 2017–2022. Terdapat 5 pasangan calon Wali Kota Langsa dan Wakil Wali Kota yang mendaftar pada Pilkada serentak 2017 ini. Calon petahana, Usman Abdullah mencalonkan diri bersama H. Marzuki Hamid dengan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Selain itu, Yuniar dan turut mencalonkan diri menjadi Wali Kota didampingi oleh Heldiyansyah Z. Mard. Pasangan ini diusung Partai Golkar dan PAN.

Pemilihan Umum Wali kota Langsa 2017 dimenangkan oleh Usman Abdullah dan H. Marzuki Hamid dengan perolehan suara 48,41%. Usman Abdullah akrab disapa Toke Suum dan wakilnya, Marzuki Hamid, dipastikan kembali memimpin Kota Langsa untuk periode 2017-2022. Kepastian itu diperoleh setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa mengunggah seluruh form C1 dari 278 tempat pemungutan suara di Langsa ke pusat data *real count* Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Data di situs resmi KPU menunjukkan pasangan petahana itu memperoleh 34.272 suara atau 48,40 persen, unggul atas

pasangan lainnya, Fazlun Hasan-Syahyuzar Aka, yang memperoleh 19.614 suara atau 27.72 persen.

Sementara itu, pasangan Yuniar dan Heldiyansyah memperoleh suara 13.638 atau 19,26 persen. Pasangan Asy'ari dan Teuku Muhammad Nurdin memperoleh suara 2.173 atau 3,07 persen, dan pasangan terakhir Syaifuddin H Amin dan Khairul Anwar hanya memperoleh suara 1.108 suara atau 1,56 persen. Berdasarkan Data KIP Langsa menyebutkan, hasil akhir KIP Langsa tetap pada keputusan rekapitulasi dan pleno yang akan dilakukan pada 23-24 Februari mendatang. Menurut data C1, total pemilih sebanyak 73.816 suara dari total pemilih 109.885 suara atau partisipasi pemilih hanya 67,2 persen. Rekapitulasi dilakukan berjenjang, dan KIP berpegang pada rekapitulasi manual. Dia menyebutkan, masyarakat Langsa diharapkan menunggu keputusan resmi yang dikeluarkan KIP Langsa. Data di *website* sebagai pembandingan, dan sudah dijelaskan juga di situs tersebut bahwa keputusan akhir tetap mengacu pada rekapitulasi berjenjang.

Realita di atas ini menjadi alasan mengapa peneliti memilih Partai Aceh sebagai studi kasus penelitian. Beranjak dari fenomena kemenangan Partai Aceh (PA) pada Pemilihan kepala daerah dengan kemenangan berturut-turut di Kota Langsa dan mendorong penulis untuk melihat perbandingan yang terjadi di Kota Langsa karena Kota Langsa merupakan daerah pemenangan dengan kemenangan mutlak sehingga peneliti tertarik meneliti mengenai **“Strategi Komunikasi Politik Islami Partai Aceh Dalam Pemenangan Pilkada 2017 (Study Kasus Kota Langsa)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar strategi komunikasi politik Islami Partai Aceh dalam pemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa ?
2. Bagaimana perencanaan strategi komunikasi politik Islami Partai Aceh dalam pemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa?
3. Bagaimanakah study kasus lapangan terhadap pilkada 2017 di Kota Langsa ?

C. Tujuan

- 1) Tujuan
 - a) Untuk mengetahui dasar strategi komunikasi politik Islami Partai Aceh dalam pemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa.
 - b) Untuk mengetahui perencanaan strategi komunikasi politik Islami Partai Aceh dalam pemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa.
 - c) Untuk mengetahui study kasus lapangan terhadap pilkada 2017 di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian.

- 1) Manfaat
 - a) Manfaat secara akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu komunikasi Penyiaran islam, yang mengkaji tentang ilmu komunikasi

dilihat berdasarkan strategi-strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga partai politik.

- b) Manfaat secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber informasi, bagi kalangan masyarakat pada umumnya mengenai strategi komunikasi Politik sebuah lembaga partai politik dalam pemenangan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legeslatif.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahan dalam memahami kata-kata yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan penjelasannya.

Adapun kata-kata di maksud adalah sebagai berikut :

- a. Strategi komunikasi Politik Islami:

Strategi komunikasi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.⁴ Sedangkan komunikasi menurut Carl I Hovland komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah prilaku orang lain (komunikan). Menurut peneliti, strategi komunikasi politik Islami adalah cara atau metode yang akurat, tepat dan efisien yang digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap suatu

⁴ Lawrence R. Jauch & william F Glueck, *Menagemen Strategis dan kebijakan perusahaan*, (Jakarta : PT. Erlangga 1988) Cet ke-3 hal 12

objek agar dapat melawan lawan politik dengan cara dan ketentuan dalam Islam baik secara verbal maupun non verbal.

b. Partai Aceh

Partai Aceh adalah partai politik yang didirikan oleh para mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai Aceh berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH akta notaris 07 pada tanggal 7 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilcum dan HAM dengan nomor : WL.UM. 08 06-01.⁵

c. Pilkada

Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah, Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.⁶

F. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori mengenai partai politik secara umum, dan teori partai politik lokal. Pengertian mengenai partai politik sangat banyak dan beragam yang disampaikan oleh banyak pakar ilmu politik. Secara etimologis partai politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan menyangkut kepentingan dari kelompok masyarakat dan partai politik

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Aceh diakses tanggal 23 Maret 2017

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia diakses tanggal 23 Maret 2017

sendiri adalah suatu kelompok yang terorganisir yang angota-angotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merubut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka.

Partai politik mempunyai status dan peranan penting dalam setiap sistem demokrasi. partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara prose-proses pemerintah dengan warga negara. bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti oleh schattscheider yang di kutip oleh jimly asshidiqie, "political parties created democracy". Oleh karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk memprkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sitem politik yang demokratis. Pendapatserupa juga disampaikan dwight y king, menurutnya partai politik sebagai satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan.⁷

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. pandangan yang peling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih dari kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa, partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah di kelabui, untuk memaksakan kebijakan-kebijakan publik tertentu *at the expence of the general will* atau kepentingan umum.

Dari berbagai ilmuwan politik-politik tersebut ramlan subakti merumuskan

⁷ imly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, (jakarta: sekretariat jendral dan kapaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2006 hlm..153

partai berikut:kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang di perstukan dan dimotivasi secara idiologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintah melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun, sebagai hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat.

Pencapaian perdamaian, pembentukan parlok yang telah diraih Aceh saat ini tidak terlepas dari kesepakatan-kesepakatan yang telah diambil oleh pemerintah RI & GAM dalam serangkaian dialog, yang kemudian dituangkan kedalam sebuah teks perjanjian resmi yang kemudian lebih dikenal dengan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Teks/perjanjian inilah yang menjadi pijakan bagi para pihak dalam melaksanakan kesepakatan tersebut.

Perdamaian Helsinki yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia telah memberi peluang besar bagi perubahan neopolitik di Aceh dan nasional. Selain ditandai dengan munculnya calon independen, juga telah memberi ruang khusus bagi lahirnya partai politik lokal di Aceh pada Pemilu di Aceh, dimana kehadiran partai politik lokal ini merupakan amanat Nota Kesepahaman RI – GAM mengenai penyelesaian konflik Aceh yang kemudian di undang-undangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006, kebijakan ini tertuang dalam pasal 75 UUPA, Kemudian PP No. 20 tahun 2007.⁶ Dua produk hukum ini telah memberi legislasi mengenai keberadaan

partai politik lokal untuk bertarung dalam pemilu Aceh guna merebut kursi di parlemen tingkat provinsi dan kepala daerah.⁸

Dalam menghadapi pemilu Aceh 2017, Partai Aceh menggunakan strategi komunikasi politik yang bercorak diskusi dan dakwah. Strategi kemenangan pemilu PA selanjutnya direncanakan dalam bentuk empat tahapan aksi; *pertama*, PA mendengar; *kedua*, PA mengajak; *ketiga*, PA bicara; dan *keempat*, PA menang. Keempat tahapan aksi ini diterapkan pada tahun kemenangan pemilu menjelang pemilu 2017. Dalam menjalankan empat tahapan aksi kemenangan pemilu tersebut, PA menggunakan strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa.

Peran media massa dalam mempengaruhi khayalak tidak diragukan lagi, bahkan pada masa- masa awal perkembangan teori komunikasi massa, pengaruh media massa sangat kuat dan dominan sampai akhirnya muncul teori-teori baru yang mematahkan asumsi bahwa khalayak tak berdaya seperti teori peluru. Dalam konteks pemilu 2017, media massa tetap mempunyai peran penting dalam sosialisasi program partai dan pengenalan para caleg dari partai politik. Peran-peran media massa seperti ini diakui oleh PA, karenanya PA tetap menggunakan media massa dalam strategi komunikasi politik partai.

Secara umum, komunikasi memiliki arti sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk mendapatkan *feedback* atau umpan balik. Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak dapat terpisahkan di dalam semua aspek kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial,

⁸ *Ibid*, hal. 90.

manusia selalu melakukan interaksi dengan manusia lain untuk mencapai sebuah kesepakatan dan saling pengertian (*mutual understanding*). Sedangkan pengertian politik merupakan suatu usaha atau cara yang ditempuh seseorang untuk menjalankan serta mewujudkan suatu keinginan yang meliputi kajian tentang kekuasaan (*power*) atau seni memerintah. Secara sederhana, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Menurut Mark Roelofs dan Barn Lund "*politic is talk or to put the meter, more exactly the activity of politic (politicking) is talking*" artinya komunikasi politik lebih memusatkan kajiannya pada materi yang berisi pesan-pesan politik, isu politik, peristiwa dan perilaku politik individu-individu baik sebagai pengusaha maupun yang berada dalam asosiasi-asosiasi kemasyarakatan atau asosiasi politik.⁹

G. Kajian Terdahulu

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, maka langkah awal yang ditempuh adalah mengkaji terlebih dahulu pada penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian akan akan penulis kerjakan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa ini bukan lah penelitian pertama yang dilakukan, namun penelitian seperti ini juga pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

Adapun setelah mengadakan suatu kajian kepustakaan akhirnya penulis menemukan skripsi yang berjudul *Strategi Komunikasi Politik Dewan Pimpinan*

⁹ Dalam jurnalnya Erick Wb Napitupulu, *Strategi Komunikasi Politik Dan Pemenangan Pemilu (studi kasus strategi komunikasi politik hulman sitorus, SE dan Drs. Koni ismail siregar pada masa kampanye pemilihan umum kepala daerah pematangsiantar 2010)*

Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilu 2014. Judul tersebut adalah karya Nur Ahmad El Aufa mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya Nur Ahmad El Aufa Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilu 2014 sedangkan penulis dalam penelitian ini ingin melihat strategi komunikasi partai Aceh dalam kemenangan pilkada di Kota Langsa Tahun 2017 serta hambatan yang di hadapi dalam merealisasikan strategi komunikasi politik tersebut.

Selanjutnya penulis menemukan skripsi yang berjudul ***Strategi Komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PA) Secara Ekspresi Simbolik Di Media Sosial Jelang Pemilu 2014.*** Judul tersebut adalah karya Achmad Furqon mahasiswa Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Dalam skripsinya Achmad Furqon membahas tentang bagaimana Strategi Komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PA) jelang pemilu 2014 dan bagaimana Ekspresi Simbolik Di Media Sosial Jelang Pemilu 2014. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas penulis dalam penelitian ini ingin melihat strategi komunikasi partai Aceh dalam kemenangan pilkada di Kota Langsa Tahun 2017 serta hambatan yang di hadapi dalam merealisasikan strategi komunikasi politik tersebut.

Serta dalam skripsinya Muhammad Anwar yang berjudul ***Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Elektabilitas Pada Pilkada 2015 Di Kota Samarinda.*** Dalam skripsi Muhammad

Anwar, ia menjelaskan tentang efektifitas strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera pada pilkada 2015. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas penulis dalam penelitian ini ingin melihat strategi komunikasi partai Aceh dalam pemenangan pilkada di Kota Langsa Tahun 2017 serta hambatan yang di hadapi dalam merealisasikan strategi komunikasi politik tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, persamaanya terletak pada sama-sama menggunakan strategi komunikasi politik pada sebuah partai serta menjadikan sebuah lembaga partai politik sabagai subjek dalam penelitian sedangkan perbedaanya terletak pada waktu penelitian, dan lokasi yang berbeda pula dengan penelitian sebelumnya.

H. Metodologi penelitian

Ketetapan metode dalam penelitian adalah syarat pertama dalam pengumpulan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat dalam memilih metode, maka metode penelitiannya mengalami kesulitan, bahkan tidak akan mendapat hasil yang baik sesuai yang diharapkan.

Dalam usaha memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk dalam metode studi kasus (*case studies*) dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan. Sehubungan dengan penelitian ini maka peneliti melakukan proses wawancara dan observasi langsung.

2. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Langsa. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

3. Sumber Data

Mengingat bahwa penelitian lapangan yang berisi pendapat dan pandangan sebagai bahan bacaan dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan penulisan karya ilmiah, maka untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Partai Politik

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Parpol) pasal 1 ayat (1), yang dinamakan dengan partai politik adalah :“organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²

Partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat. Definisi tentang partai politik antara lain disampaikan oleh Carl J. Fredrich mengartikan partai politik sebagai “sekelompok manusia yang

¹Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 160.

²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik.

teroganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materiil”.³ Selanjutnya Sigmund Neuman dalam karangannya *modern political parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: “Partai politik adalah organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk kekuasaan pemerintah serta merebut kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda”.⁴

Kemudian berdasarkan definisi yang dikembangkan Neumann tersebut, Cheppy Hari Cahyono mengingatkan perlunya diperhatikan empat hal sehubungan dengan usaha memperjelas pengertian mengenai istilah partai politik. Keempat hal itu yaitu: (1) Partai politik merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam suatu masyarakat; (2) Partai politik mencurahkan perhatian untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya; (3) Partai politik berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda-beda; dan (4) Partai politik merupakan lembaga perantara yang menghubungkan antar kekuatan-kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah maupun lembaga-lembaga kenegaraan.⁵

³Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar...*, hal. 165.

⁴Sigmund Neuman, *modern political parties*, (Jakarta: Kencana, 2002), hal. 86.

⁵Cheppy Hari Cahyono, *Ensiklopedi Politika*, (Universitas Michigan: Usaha Nasional, 1982), hal. 92

Melalui beberapa pendefinisian di atas setidaknya dapat ditarik titik terang mengenai konsep partai politik, yang mana merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dan cita-cita. Cita-cita untuk berkuasa. Terutama dalam memperebutkan kekuasaan di dalam negara. Dalam iklim negara demokrasi, untuk mewujudkan cita-cita partai politik membutuhkan simpati dan dukungan suara baik dari anggota (kader) partai maupun masyarakat luas guna memperoleh mandat kekuasaan (legitimasi) melalui proses pemilihan umum. Partai politik berusaha mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat luas dengan lembaga-lembaga yang melakukan kebijakan-kebijakan politik.

Partai politik merupakan tempat menyalurkan aspirasi rakyat, dimana rakyat dapat ikut di dalamnya dan berpengaruh kuat dalam pemilu, dalam pemilu pemilu 1999, 2004 dan 2009, bukanlah pemilu multipartai yang pertama. Pada pemilihan umum tahun 1955 juga diikuti banyak partai politik (multipartai), yang ketika itu diikuti 36 partai politik (36 tandagambar), tahun 1999 di ikuti 48 partai politik, tahun 2004 di ikuti 24 partai politik dan di tahun 2009 ada 44 partai politik yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai daerah di Aceh.

Banyaknya partai politik ini melambangkan sebuah negara yang Aceh, yang kemudian diharapkan menjadi penyalur aspirasi rakyat yang beragam, serta penyeimbang kekuatan politik yang ada. Begitu juga dengan banyaknya partai, diharapkan menjadi lembaga kontrol terhadap pemerintah serta sebagai sarana mengkritik rezim yang berkuasa. Adapun ada yang pro dan kontra dengan suburnya politik yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta partai politik.

Tujuan dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 10, tujuan partai politik dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus partai politik.⁶

Tujuan umum partai politik yaitu, (1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik yaitu, (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; dan (2) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam negara Aceh partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

a. Partai sebagai Sarana Komunikasi Politik

⁶Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 10,

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Selain itu partai politik disini juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijaksanaan pemerintah, dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antar pemerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dengan masyarakat.⁷

b. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Sosialisasi politik mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi yang lain. Salah satu upaya untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum maka partai harus melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat. Disinilah fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, tepatnya agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sisi lain dari fungsi

⁷ <http://alchaidar.blogspot.co.id/2008/09/kemunculan-partai-partai-politik-lokal.html>, diakses tanggal 26 januari 2018.

partaipolitik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politikmemperjuangkan kepentingan umum.⁸

c. Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yangberbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggotapartai (*political recruitmen*). Partai juga dapat memperluaspartisipasi politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain.Usahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kaderyang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection ofleadership*).⁹

d. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik (*conflictmanagement*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapatdalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika terjadi konflik,partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam kehidupanmasyaraka luas, dimana berbagai kepentingan bercampur baur tidaksedikit melahirkan konflik, semua beradu untuk mendapatkankemenangan, disamping mudah terpicu konflik horizontal diantarawarga masyarakat, juga tidak sedikit melahirkan konflik *structural*penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kondisidemikian, partai politik harus tampil sebagai penengah,

⁸ <http://alchaidar.blogspot.co.id/2008/09/kemunculan-partai-partai-politik-lokal.html>, diakses tanggal 26 januari 2018.

⁹ <http://alchaidar.blogspot.co.id/2008/09/kemunculan-partai-partai-politik-lokal.html>, diakses tanggal 26 januari 2018.

menjadi peredam konflik. Berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada penguasa, dan menginformasikan kehendak penguasa politik kepada masyarakat.¹⁰

Sedangkan fungsi Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 tentang Partai Politik adalah; (1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹¹

Secara empiris eksistensi sebuah partai politik, menurut Ali Syafa'at, dapat dilihat berdasar tiga aspek. Diantaranya adalah aspek sosiologis, aspek yuridis dan juga aspek politik.¹² Aspek sosiologi menurutnya nampak dari adanya gerakan-gerakan sosial yang diperjuangkan sebuah partai politik sejak didirikan. Sedangkan dalam aspek yuridis, menyitir Hans Kelsen, Syafa'at menjelaskan bahwa eksistensi partai politik secara hukum ada ketika menerima status secara sah sebagai badan hukum baik karena cara pembuatan maupun setelah proses

¹⁰ <http://alchaidar.blogspot.co.id/2008/09/kemunculan-partai-partai-politik-lokal.html>, diakses tanggal 26 Januari 2018.

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 tentang Partai Politik.

¹² Ali Syafa'at, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 32.

tertentu. Kemudian dalam aspek politis eksistensi sebuah partai politik ada ketika partai politik tersebut terlibat dalam aktivitas politik, terutama dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam negara demokrasi mekanisme utama untuk memasuki wilayah dan kekuasaan politik adalah dengan hanya melalui “gerbang” pemilihan umum. Oleh karena itu keberadaan dan kekuatan partai politik secara politis ditentukan saat mengikuti pemilihan umum di Negara yang bersangkutan.¹³

B. Pemilu

Pemilu adalah salah satu pilar utama dari demokrasi. Secara tidak langsung demokrasi di Indonesia mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat, dilaksanakan pemilu. Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya. Dalam konteks sistem politik, pemilu mengandung tiga prana secara keseluruhan yang menghubungkannya dengan demokrasi yaitu: (1) persaingan, yakni apakah setiap orang diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai calon yang mewakili rakyat; (2) peran serta politik (partisipasi politik), yakni rakyat ikut serta dalam proses seleksi wakil atau pemimpin mereka dan memilih mereka sebagai pemimpin untuk semuanya; (3) kebebasan politik dan kebebasan sipil yang mewujudkan dalam kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi dasar persaingan dan peran

¹³Ali Syafaat, *Pembubaran...*, hal. 32.

serta. Dengan demikian pemilu dapat menjadi aktualisasi asaskedaulatan rakyat yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untukrakyat.¹⁴

Pelaksanaan pemilu merupakan amanah berdasarkan UUD 1945Bab 1 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “kedaulatan berada ditangan rakyat dandilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian pilumerupakan salah satu perwujudan jaminan hak asasi warga negara. Setiapwarga negara diberikan kebebasan untuk turut serta dalam menentukankebijakan pemerintah dan salah satunya adalah melalui pemilu yang seringdisebut sebagai pesta demokrasi bagi rakyat.

Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakilrakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satupelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.¹⁵ Menurut Ramlan, pemilu dapat diartikan sebagai mekanismepenyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orangatau partai yang dipercaya.¹⁶

Tujuan dari pemilu dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat 2 dinyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih DewanPerwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden danwakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan

¹⁴Dawam Raharjo, *Krisis Kapitalisme Global Ilusi atau Realistis?*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hal. 112.

¹⁵Syarbaini, *Sosiologi dan ;Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 51.

¹⁶Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan kepala daerah langsung: filosofi, sistem, dan problema penerapan di Indonesia*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2005), hal. 29.

¹⁷UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat 2.

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 3 juga disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dengan pelaksanaan pemilu dengan partisipasi rakyat maka diharapkan akan mampu menjadikan perubahan yang berarti bagi kehidupan rakyat, bangsa dan Negara.¹⁸

Pemilihan umum mempunyai peran penting dalam negara demokrasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2, bahwa pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas; (1) langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara; (2) umum yaitu mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial; (3) bebas yaitu setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun; (4) rahasia yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun; (5) jujur dalam penyelenggaraan pemilu aparat pemerintah, peserta pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak terkait harus jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (6) adil yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilu dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari

¹⁸Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 3.

kecurangan pihak manapun.¹⁹Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses penyelenggaraan pemilihan umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga yang berkualitas. Para anggota DPRD sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara dan untuk membentuk pemerintahan. Keterkaitan antara partai politik dengan pemilu legislatif yaitu bahwa setiap anggota legislatif yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif harus berasal dari partai politik tertentu. Hal tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap calon legislatif. Partai politik merupakan wadah yang digunakan untuk mengantarkan calon/individu untuk menduduki kursi legislatif di Indonesia. Pemilu legislatif yang sangat identik dengan partai politik, merupakan hal yang wajar dalam suatu Negara demokrasi yang memiliki sistem multi partai, yang artinya partai politik memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum dan atau pemilu legislatif yang diselenggarakan di negara yang bersistem demokrasi seperti halnya Indonesia. Partai politik tersebut akan berfungsi untuk menampung aspirasi rakyat dan membelajarkan pendidikan politik pada rakyat yang disalurkan melalui pemilu dan pemilu legislatif.

C. Strategi

Strategi adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagal strategi pada akhirnya.²⁰ Taktik adalah seni menggunakan kekuatan bersenjata dalam pertempuran. Strategi

¹⁹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2

²⁰Erwin Parengkuan, *Strategi Taktis Komunikasi Berdasarkan Kepribadian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 73.

merupakan seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan dan bertujuan mencapai perdamaian. Rencana jangka panjang tersebut kita sebut strategi. Dalam Strategi ini, tujuan-tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun, tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya.²¹

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi dapat juga diartikan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para rakyat di masa depan. Strategi berarti pendekatan dalam mengelola kegiatan, dengan mengintegrasikan komponen urutan kegiatan, bagaimana mengorganisasikan kegiatan, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi yaitu: (1) mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki dan menentukan Misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut; (2) melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam menjalankan misinya; (3) merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; (4)

²¹Anwar Arifin, *Ilmu komunikasi: sebuah pengantar ringkas*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 32.

menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan (5) memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.²²

Art Of Political War memiliki enam prinsip; (1) Politik adalah perang dengan peralatan lain; (2) politik adalah perang merebutkan posisi; (3) dalam politik yang menang biasanya adalah sang *aggressor*; (4) posisi didefenisikan dengan kekuatan dan harapan; (5) senjata politik adalah simbol ketakutan dan harapan; dan (6) kemenangan selalu berada di pihak rakyat. Manajemen politik adalah sebuah seni dan keterampilan tentang perebutan kekuasaan dan alatnya bukanlah mainan anak-anak, dan instrumennya yang disebut dengan ketakutan dan harapan bisa berupa senjata tajam.²³

Dalam merumuskan menjelaskan bahwa dalam pemilihan strategi harus ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan, selanjutnya ia berpendapat bentuk yang lain dalam memimpin perang adalah menyerang strategi lawan, kemudian yang terbaik berikutnya adalah menghancurkan aliansi lawan, berikutnya adalah menyerang tentara lawan, sedangkan yang paling buruk adalah menduduki kota-kota yang dibentengi lawan. Untuk dapat menyerang lawan, maka strategi lawan tersebut harus dapat dikenali terlebih dahulu. Oleh karena itu pengenalan atas pihak lawan sangatlah penting. Jika tidak, kita tidak akan dapat mengenali lawan. Penyerangan strategi lawan berarti secara terus menerus mengganggu jalannya pelaksanaan strategi lawan, sehingga lawan tidak bisa

²²Anwar Arifin, *Ilmu komunikasi: sebuah pengantar...*, hal 36.

²³Anwar Arifin, *Ilmu komunikasi: sebuah pengantar...*, hal. 37.

merealisasikan strateginya. Dalam sepak bola hal ini dikenal dengan istilah gangguan dini yang menyebabkan pola permainan tidak dapat dibangun.²⁴

D. Strategi Partai Aceh dalam Pemilu Legislatif

Strategi perlu dilakukan oleh kontestan partai politik untuk dapat memenangkan pemilu. Kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besarnya pendukung mereka dan pendukung kontestan lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pencontrengan, juga untuk mengidentifikasi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu dipikirkan oleh para kontestan karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik.

Sementara itu, cara masyarakat menentukan pilihannya juga tergantung pada karakteristik masyarakat bersangkutan dan bagaimana partai politik memberikan sosialisasi kepada rakyat dalam kampanye. Di sisi ini, terdapat kelompok masyarakat yang lebih menggunakan logika dan rasionalitas dalam memilih calon yang akan dipilihnya, apakah baik, sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang bisa mendengar aspirasi mereka. Di sini partai politik harus sangat pintar dalam mengambil hati rakyat, strategi sangat dibutuhkan oleh partai politik, karena dengan strategi sebuah partai politik dapat berkembang dengan baik sesuai dengan misi dan visi yang dicanangkan oleh partai politik yang bersangkutan. Sehingga tujuan yang akan dicapai akan terlaksana sesuai dengan

²⁴Anwar Arifin, *Ilmu komunikasi: sebuah pengantar...*, hal. 38.

aspirasi rakyat, serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dalam suatu wilayah atau Negara.

Tujuan dari setiap strategi bukanlah kemenangan yang dangkal, tapi perdamaian yang mendasar, penerangan program-program yang tepat dan reformasi. Jika tujuan jangka panjang strategi ini tidak tampak, misi bagi kemenangan akan tampak sebagai perjuangan bagi kekuasaan dan kekayaan pribadi, sebagai sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.²⁵

Strategi yang banyak diterapkan oleh kontestan dalam pemilihan umum yaitu strategi marketing politik dan strategi komunikasi. Dalam strategi marketing politik aktivitas politik mencakup desain, implementasi, dan pengendalian program-program yang dimaksud untuk meningkatkan penerimaan maksud atau tujuan dan ide-ide sosial pada kelompok sasaran. Aktivitas *Person marketing* bertujuan untuk menciptakan seorang pribadi terkenal yang mempunyai citra diri tertentu yang kuat karena kepribadian, sikap dan tindakannya.

Aktivitas marketing politik dimulai dengan riset dan analisis untuk menemukan kebutuhan konsumen dan segmen pasar. Partai politik harus mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan sehingga mampu menawarkan produk politik yang memiliki nilai (*value*) lebih atau setidaknya berbedadengan partai lainnya. Produk politik meliputi program kerja, ideologi, dan figur seorang pemimpin yang memiliki *brand* berbeda dengan kandidat lain.

Dalam berkampanye, partai politik dan kandidat dituntut untuk selalumenunculkan *image* positif sebagai *brand* sebagai partai politik

²⁵Erwin Parengkuan, *Strategi Taktis...*, hal. 78.

atau kandidat yang berpihak pada rakyat. Khusus *brand building* tentang personal kandidat atau *personal branding* menjadi dimensi yang sangat penting yang harus ditampilkan. Dari sudut *brand*, kapasitas dan kualitas pemimpin (*leader*) memainkan peranan yang sangat penting. *Brand* sebuah partai dan pemimpin adalah identitas yang melekat dan tidak bisa dipisahkan, sehingga partai politik dan pemimpin tidak dengan mudah mengganti identitas atau *brand* sebagaimana dalam dunia politik. Faktor isu dan program memberi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih. Diperlukan juga pemasaran produk komersial dalam partai politik atau disebut juga medium presentasi yang meliputi agen (orang atau institusi), objek (media visual, audio visual, pernak-pernik, posko), dan *event* (kegiatan atau peristiwa tertentu) semua itu merupakan promosi yang bertujuan menguatkan konsumen untuk memilih partai tersebut.²⁶

Dalam marketing politik dibutuhkan juga komunikasi yang bertujuan menyampaikan program-program, ide-ide meliputi merawat ketokohan dan mementapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan (memahami rakyat, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, memilih dan memilih media), membangun konsensus (seni berkompromi, bersedia membuka diri). Artinya dengan ketokohan seorang politikus dan kemantapan lembaga politik dalam masyarakat, memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Pada hakekatnya suatu strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan diambil guna mencapai

²⁶Alo Lilwari, *Strategi komunikasi masyarakat*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal. 112.

politik masadepan. Disaat komunikasi berlangsung, yang berpengaruh bukan pesan politik, melainkan ketokohan seorang komunikator politik dan lembaga politik yang mendukungnya, sangat menentukan berhasil tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

Selain itu juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, memilih metode, dan media politik yang tepat, dan juga menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak dan menyusun pesan homofili. Suasana homofili yang harus diciptakan adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), persamaan busana, persamaan kepentingan dengan khalayak terutama mengenai pesan politik, metode dan media politik. Namun yang sangat penting, adalah siapa tokoh yang akan melakukan komunikasi kepada khalayaknya. Selanjutnya yaitu membangun konsensus baik antara politikus dengan politikus dalam partai yang sama maupun dengan politikus dari partai lain. Hal itu pula umumnya terjadi baik dalam rapat dan persidangan maupun dalam lobi, dengan menggunakan komunikasi interaktif sesuai dengan paradigma interaksional.²⁷

Tujuan utama penggunaan strategi ini adalah memperoleh kekuasaan dan pengaruh dengan memperoleh hasil yang baik dalam pemilu umum legislatif maupun eksekutif, sehingga politik dapat diwujudkan dan suatu perubahan dalam masyarakat dapat tercapai. Upaya memperebutkan suara pemilih yang cukup dalam pemilihan umum bukanlah persoalan yang mudah. Oleh karena itu untuk dapat meraihnya dibutuhkan perencanaan strategi yang merupakan pemikiran dan

²⁷Asep Suepulah Muhtadi, *Kampanye politik*, (Jakarta: Humaniora, 2008), hal. 128.

perumusan yang meliputi cara bersikap, tujuan, dan alternatif untuk bersikap atau bertindak, pilihan optimal yang dimiliki dan penetapan instruksi untuk mewujudkannya secara rasional.²⁸

Pemikiran dan perumusan ini dilakukan secara sistematis dan mengarah ke depan. Strategi yang matang dapat dijalankan atau dilaksanakan dapat membawa ketitik puncak dari sebuah partai yaitu dapat dikenal dimasyarakat bahwa partai tersebut baik, dapat dipercaya untuk menyapaikan aspirasi rakyat dan paling penting strategi ini dapat membawa kemenangan dalam pemilu legislatif maupun eksekutif. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah Partai Aceh yang dibangun dengan cita-cita sebagai partai yang mencitrakan modernitas, kedamaian, kesejukan, menjunjung tinggi moralitas dan bertanggung jawab terhadap pendidikan politik masyarakat. Selain itu, Partai Aceh sebagai partai baru mengusung platform yang berupaya merangkul kaum nasionalis dan kaum agama sekaligus. Sehingga kemudian ideologi yang dirumuskan adalah nasionalis-religius.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 48:

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ٤٨

Artinya: “Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang” (Q.S. An-Nuur: 48).

Tentang Sifat-Sifat Pemimpin dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 247:

²⁸Alo Lilweri, *Strategi komunikasi...*, hal. 115.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمَلَكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلَكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٤٧

Artinya: "Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui" (Q.S, Al-Baqarah: 247).

Surat tentang Melantik Pemerintah dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-A'raaf

: ayat 142:

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۗ أَرَبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ١٤٢﴾

Artinya: "Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan". (Q.S. Al-A'raf: 142).

Tentang Tanggungjawab Pemimpin dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat surat

Al-Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلسُّحْتِ فَاِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (Q.S. Al-Maidah: 42).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.¹ Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitik, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan dari observasi, wawancara dan dokumentasi agar dapat dibuat rangkuman/kesimpulan dari objek yang diteliti.² Penelitian ini lebih difokuskan diripadakan kajian atas studi kasus strategi pemenangan pilkada partai Aceh di Kota Langsa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Langsa.

C. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan bagian yang baik untuk penelitian ini. Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang di peroleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan

¹HusainiUstman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 78.

²HusainiUstman, *Metodologi Penelitian...*, hal. 79.

jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti, yaitu strategi pemenangan pilkada partai Aceh di Kota Langsa.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dikarenakan yang menjadi subyek atau informan adalah kepala desa, sekretaris desa, penambang minyak serta orang yang dianggap mengetahui seluk-beluk masalah penelitian ini dan tidak menggunakan populasi dan sampel karena hal ini menjadi bagian dari pendekatan kuantitatif.³

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan memilih orang-orang yang diduga dan diyakini mengetahui permasalahan yang diteliti.⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).⁵ Observasi terbagi menjadi 2 yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah apabila observasi (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasinya. Sedangkan Observasi Non

³Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 77

⁴. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 106.

⁵SaifuddinAzwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005), hal. 23.

Partisipan merupakan suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Dengan observasi partisipan ini, maka data diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap pelaku yang nampak.⁶

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, karena penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan.⁷

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dilakukan dengan metode wawancara terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan

⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 23.

⁷Saifuddin Azwar, *Metode...*, hal. 24.

pertanyaanya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.⁸

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan tentang strategi pemenangan pilkada partai Aceh yang meliputi: sejarah partai Aceh, letak visi dan misi, moto, serta kegiatan politik dan kontribusi partai di Kota Langsa.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.³ Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & GD*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.212.

³Suhasimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 48.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2. Data *Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.
3. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.

F. Keabsahan Temuan Data

Adapun untuk keabsahan data dan kebenaran suatu data, maka makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.⁴

Kebenaran dan kegunaan data akan menjadikan tidak jelas bila tanpa pengujian terhadap kebenaran, kekokohan, dan kecocokan data tersebut. Karenanya menjadi sangat penting keabsahan terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka penelitian mengikuti beberapa kriteria pengecekan, yakni: Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas.

1. Kredibilitas

⁴Riduwan, *Analisis Statistika Penelitian* (Jakarta: UI Press. 2010), h. 122.

Ada tiga tehnik pengecekan yang penelitian gunakan dari sembilan teknik yang disarankan Moleong, yaitu:

- a. Triangulasi
- b. Pengecekan anggota
- c. Diskusi teman sejawat⁵

Trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan meliputi sumber data dan metode triangulasi dalam sumber data merupakan perbandingan dan pengecekanulang derajat kepercayaan suatu informasi yangdiperoleh melalui waktu dan alat yangberbeda dalam metode kualitatif patton. Triangulasi sumber data dilakukan dengan menanyakankebenaran data tertentu yang diperoleh dari informasi suatu kepada informasi lainnya.

Selanjutnya, dilakukan triangulasi metode yakni mengumpulkan data yang diperoleh dari seorang informan yang kemudian dibuktikan dengan cara membandingkandata atau informasi yangdikumpulkan melalui teknik tertentu dengan data atau informasi yang dikumpulkan melalui tehnik lain.

Sementaraitu, pengecekananggota dilakukan dengan cara menunjukkan dataatau informasi, dan juga hasil interpretasi peneliti yang telah ditulis dalam format catatan lapangan atau traskrip wawancara yang ada

⁵Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 69.

teman sejawat, yang peneliti tempuh untuk memeriksa keabsahan data dengan cara mendiskusikan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian kepada teman sejawat. Hal ini dimaksudkan untuk meminta masukan, saran yang berkaitan dengan fokus penelitian. Cara lain yang peneliti lakukan adalah berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Transferabilitas

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara “Uraian rinci” dengan begitu. Penelitian dapat melaporkan hasil penelitian secara mendetail dan secermat mungkin dalam menggambarkan lokasi penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Uraian rinci yang dimaksud untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerhati dan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti.

3. Dependabilitas

Dependabilitas merupakan salah satu kriteria penelitian. Apakah proses penelitian tersebut bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan agar proses penelitian dapat dipertahankan adalah dengan mengaudit dependabilitas yang dilakukan oleh auditor independen untuk menelaah dan mengkaji kegiatan peneliti selama melakukan penelitian dan auditor independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini adalah dosen pembimbing.

4. Konfirmabilitas

Kriteria ini dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada data atau informasi yang dilacak serta interpretasi dengan dukungan materi yang ada pada penulisan audit.⁹

Sementara itu, penelitian mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara, hasil dokumentasi (foto dan perekam) hasil analisis data, dan catatan tentang proses penyelenggaraan (strategi metodologi dan usaha keabsahan) dan untuk melalui kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian melalui empat tahap:

1. Tahap Sebelum Kelapangan

Meliputi kegiatan fokus penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin. Penjajakan latar penelitian mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada subyek yang diteliti, konsultasi pusat penelitian, penyusunan usulan penelitian, seminar kelas dan pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan yang meliputi kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dirumuskan dan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan yaitu memahami latar penelitian, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

⁹S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 36.

3. Tahap Analisis Data

Meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan pihak tim sukses partai Aceh di Kota Langsa, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sehingga data benar-benar kredibel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

4. Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan para dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan dan kritikan, perbaikan dan saran kemudian di tindak lanjuti dengan perbaikan sesuai dengan pengarah dari dosen pembimbing dan menyempurnakan hasil penelitian skripsi.¹⁰ Kemudian setelah skripsi disetujui oleh para dosen pembimbing langkah terakhir dalam penelitian ini adalah mengurus kelengkapan persyaratan untuk mengajukan ujian skripsi.

H. Pedoman Penulisan

¹⁰Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Jurusan KPIAIN Langsa Tahun 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Partai Aceh

Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami, Aceh mengalami banyak kesulitan pada masa itu dengan kehilangan segala-galanya. Semuanya dimulai dengan MOU Helsinki yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM, dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud.

Setelah MoU Helsinki ditandatangani, dengan serta merta keadaan aman dan damai terwujud di Aceh. Berdasarkan point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.¹

Atas dasar inilah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi

¹<http://islamumin.blogspot.co.id/2014/04/sejarah-berdirinya-partai-aceh.html>, diakses 30 Desember 2017

sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.²

Pimpinan Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu'ad, SH atau disebut juga Muhammad Yahya Mu'ad, SH untuk terbentuknya partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH akta notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilkum dan HAM dengan nomor : WI.UM. 08 06-01.

Kantor sekretariat pertama Dewan Pimpinan Aceh Partai GAM berada pada jalan Tgk. Imuem Lueng Bata No. 48 Banda Aceh. Walaupun secara undang-undang peraturan pemerintah secara masalah bintang bulan tidak bertentangan, pemerintah pusat melihat tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bersamaan dengan itu, maka lahirlah Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang Partai yang seharusnya ada.

Pada surat KANWILDEPKUM dan HAM Aceh menyatakan bahwa untuk Partai GAM harus ada kepanjangan atau akronim dan dipindahkan bulan bintang. Jika tidak diubah, maka tidak boleh diverifikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebab

²<http://islamumin.blogspot.co.id/2014/04/sejarah-berdirinya-partai-aceh.html>, diakses 30 desember 2017

itulah Partai GAM berubah dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM), dan juga diverifikasikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM pada tanggal 3 sampai dengan 24 April 2008.

Kemudian atas dasar persyaratan nasional tertulis dalam poin 1.2.1 MoU Helsinki, dengan kebijakan Pemerintah agar tidak menggunakan nama GAM. Sebab itulah pihak Kanwilikum dan HAM menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri untuk merubah lagi namanya.

Pada tanggal 6 s/d 7 April 2008 diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta CMI yang difasilitasi oleh IPI Interpeace di Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh. Setelah itu rekrutmen calon legislatif dari Partai Aceh terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh.

Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh. Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Dalam Pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi yang tersedia. Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami, Aceh mengalami banyak kesulitan pada masa itu dengan kehilangan segala-galanya. Semuanya dimulai dengan MOU Helsinki yang ditanda-tangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas

nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM, dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud.³

Seterusnya Partai Aceh mengadakan kampanye dengan mengutamakan implementasi MoU Helsinki dan Pimpinan Partai Aceh tidak ada yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dengan itu Partai Aceh berkomitmen untuk membangun Aceh secara khusus dan membangun Indonesia secara umum serta menjaga kesatuan dan persatuan seluruh tanah air.⁴

Berikut adalah nama-nama Tim Relawan Pemenangan Partai Aceh Kota Langsa, yaitu:

1. Barisan Muda
2. Pantai Timur
3. Baret bar
4. Putri Umara
5. Sahabat Umara
6. Sahabat Toke
7. Tim Bayangan
8. Baretos
9. Gerakan Langsa Membangun
10. Gardu
11. Relawan Umara
12. BUM Uroe Malam
13. MPU

³ Hasil Observasi Penulis di Parpol Langsa Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018.

⁴ <http://www.partaia Aceh.com/2012/02/sejarah-partai-aceh.html> diakses 30 desember 2017

14. Gema
15. Geupeuna
16. Aceh Meutuah
17. Rakan Mualem
18. Barakate
19. Gempur
20. Putro Aceh
21. Inong Balee
22. Langsa Bersatu

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Strategi Komunikasi Politik PA

Perubahan UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu sebagai dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang suaraterbanyak, tidak merubah kebijakan PA dalam strategi komunikasi politiknya. Karena itu, baik sebelum maupun sesudah perubahan Undang-undang pemilu kebijakan strategi komunikasi politik PA tetap didasarkan pada partai daerah yang menjunjung tinggi nilai Islami seperti serambi slogan Bumi Aceh serambi mekah yang merupakan dakwah. Hal ini sesuai dengan Platform pembangunan PA. Dalam Platform pembangunan PA dinyatakan bahwa dakwah yang dibutuhkan untuk memperbaiki umat adalah suatu gerakan dakwah yang menyeluruh, dakwah yang mampu mempersiapkan segala kekuatan untuk menghadapi segala medan yang berat dan rumit. Dakwah harus mampu mencetak kader-kader yang handal dari berbagai latar belakang kemampuan dan kemahiran

yang saling bertaut memberdayakan umat (Dokumen Falsafah Dasar dan Platform Kebijakan Pembangunan PA). Karena itu, maka strategi komunikasi politik PA dalam kemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa adalah bercorak dakwah yang menjangkau para ulama, cendekiawan dan masyarakat umum.⁵ Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Wakil Walikota Langsa, bahwa:

“Partai Aceh sebagai partai yang menjangkau seluruh ulama, para tokoh pendidikan dan masyarakat dengan dakwah, maka strategi yang dijalankannya sudah tentu tidak terlepas dari karakter dakwah itu sendiri, di mana dakwah yang dilakukan adalah dengan cara berkesinambungan di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan baik sebelum maupun sesudah perubahan undang-undang pemilu. Dakwah yang dilakukan tidak hanya beberapa bulan atau satu tahun sebelum pemilu tetapi dilakukan secara terus menerus. (wawancara tanggal 3 November 2017).⁶

Pernyataan Bapak Wakil Walikota di atas menekankan akan corak strategi komunikasi politik dari PA yang dipengaruhi oleh visi PA sebagai partai dakwah. Dalam konsep Islam, dakwah merupakan perintah agama yang menyerukan pada umat manusia untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Karena perannya yang begitu penting, maka seorang pendakwah merupakan seorang komunikator yang harus mempunyai kredibilitas baik, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk jadi panutan.⁷

Dilihat dari sisi proses, dakwah pada dasarnya merupakan usaha transformasi sosial yang bergerak di antara keharusan ajaran dan kenyataan masyarakat yang menjadi obyek utamanya. Karena itu, dakwah sejatinya dilakukan dengan senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek kultural,

⁵ Rakhmad Fadli Zain “*Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Politik (Dalam Proses Perdamaian)*” skripsi program studi ilmu politik universitas Indonesia tahun 2009.

⁶ Wawancara Bapak Wakil Walikota Langsa Pada Tanggal 3 November 2017

⁷ Wawancara Bapak Wakil Walikota Langsa Pada Tanggal 3 November 2017

selain aspek ajaran yang menjadi substansi informasi dalam proses tersebut. Dimensi politik, baik menyangkut pesan maupun lingkungan di mana dakwah dijalankan, juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan dakwah. Sebab dakwah sendiri pada hakikatnya merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia untuk melakukan proses rekayasa sosial melalui usaha mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial dan norma agama.

Pendekatan dakwah sebagai dasar dalam strategi komunikasi politik PA ini dapat dipahami mengingat fungsi dakwah sebagai saluran akulturasi ajaran agama dalam tataran kehidupan masyarakat, senantiasa bersentuhan dan bergumul dengan gerak masyarakat yang mengitarinya. Dalam hal ini, politik dapat diperankan sebagai bagian dari proses pendekatan kekuasaan. Politik juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, yang proses internalisasinya dapat disosialisasikan secara kultural melalui kegiatan dakwah. Di sinilah PA melihat dakwah sebagai suatu proses yang dinamis, atau suatu kekuatan yang hidup dalam mobilitas sosial tertentu, dan yang pada gilirannya merupakan daya pendorong terbentuknya sistem sosial di mana dakwah itu dilaksanakan.

Menurut Salah satu pengurus DPC PA Kota Langsa, berkaitan dengan pemahaman dakwah mengatakan sebagai berikut: Dakwah itu adalah merubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik, dan itu yang kita lakukan. Kita merubah masyarakat itu berangkat dari keteladanan pengurus partai. PA itu partai yang bisa

mendapatkan *trust* di mata masyarakat, dan itu sedikit banyak targetnya terpenuhi.⁸

Hal yang lebih penting lagi adalah strategi dakwah oleh PA dilakukan secara berkesinambungan, jadi tidak hanya dilakukan ketika menjelang pemilu tetapi secara terus-menerus selama satu periode kepemimpinan (selama lima tahun). Hal ini cukup berbeda dengan partai-partai lain yang menjalankan kegiatan atau program partai maupun komunikasi politiknya hanya saat menjelang pemilu dan kampanye. Strategi yang didasarkan dakwah secara berkesinambungan ini dianggap cukup efektif dalam membentuk citra positif partai di benak masyarakat, yaitu citra PA sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional. Kepedulian terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan waktu menjelang pemilu tetapi setiap waktu di mana masyarakat memerlukan peran dari partai politik.

2. Perencanaan Strategi Komunikasi Politik PA

Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi sumber daya (dana, manusia, dan infrastruktur) dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, perencanaan dibutuhkan agar setiap program dan aktivitas partai memiliki kesamaan gerak dan arah. Perencanaan berarti pula mengaitkan satu aktivitas dengan aktivitas lain. Dengan demikian akan terjadi sinergi dan konsistensi di antara program-program partai PA dalam kemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa.⁹ Lebih jauh lagi, perencanaan akan memberikan *image* dan pesan khusus mengenai keseluruhan

⁸Wawancara Basri, Pengurus DPC PA Kota Langsa Hari Kamis Pada Tanggal 9 Agustus 2018.

⁹Wawancara Furqan Ibram, pengurus DPC PA Kota Langsa Hari Kamis Pada Tanggal 9 Agustus 2018.

aktivitas yang dilakukan. Tanpa adanya perencanaan, tidak akan ada keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Perencanaan strategi komunikasi politik PA disesuaikan dengan mekanisme yang ada di partai sebagai partai dakwah. Sebagai mana dikatakan oleh salah satu Timses PA dalam kemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa, bahwa:

“Proses perencanaan itu, pertama seiring dengan mekanisme *syuro* di partai. Perencanaan umum biasanya berkaitan dengan target-target PA sebagai partai dakwah, itu di awal periode. Kebijakan umum di awal periode itu akan diterjemahkan khusus ketika menjelang pemilu dengan program-program kemenangan. Menjelang pemilu PA sudah mengatur gerakannya fokus pada kemenangan pemilu, dan tahun programnya disebut tahun kemenangan pilkada.”¹⁰

Pernyataan beliau di atas menegaskan bahwa strategi komunikasi politik PA dalam kemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa dilakukan secara terencana. Proses perencanaan ini merupakan hasil dari mekanisme yang ada di partai terutama yang dilakukan oleh DPP PA. Fungsi utama sebuah perencanaan adalah menciptakan keteraturan dan kejelasan arah tindakan. Perencanaan merupakan tahap yang harus dilakukan agar komunikasi politik atau kampanye partai dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹ Menurut Gregory ada beberapa alasan mengapa sebuah perencanaan harus dilakukan dalam sebuah kampanye, yaitu:

- a. Menfokuskan usaha. Perencanaan membuat tim kampanye dapat mengidentifikasi dan menyusun tujuan yang akan dicapai

¹⁰Wawancara Nurdin Juned Ketua Tim KPPA Kota Langsa Hari Kamis Pada Tanggal 9 Agustus 2018.

¹¹Wawancara Nurdin Juned Ketua Tim KPPA Kota Langsa Hari Kamis Pada Tanggal 9 Agustus 2018.

dengan benar hingga akhirnya pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

- b. Mengembangkan sudut pandang berjangka waktu panjang. Perencanaan membuat tim kampanye melihat semua komponen secara menyeluruh.
- c. Meminimalisasi kegagalan. Perencanaan yang cermat dan teliti akan menghasilkan alur serta tahapan kerja yang jelas, terukur dan spesifik serta lengkap dengan langkah-langkah alternatif.
- d. Mengurangi konflik. Konflik kepentingan dan prioritas merupakan hal yang sering terjadi dalam sebuah kerja tim dan perencanaan yang matang akan mengurangi potensi munculnya konflik.
- e. Memperluas kerja sama dengan pihak lain. Sebuah rencana yang matang akan memunculkan rasa percaya para pendukung potensial serta media yang digunakan sebagai saluran komunikasi, hingga akhirnya akan terjalin kerjasama yang lancar.

Guna mencapai tujuan jangka panjang dan antara, partai politik membutuhkan perencanaan strategi yang bersifat jangka panjang maupun jangka menengah. Begitu juga dengan PA, mempunyai strategi jangka panjang dan menengah. Strategi partai dapat dibedakan dalam beberapa hal. Pertama, strategi yang terkait dengan penggalangan dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini publik ataupun selama periode pemilihan umum. Strategi ini penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara yang mendukung kemenangan suatu partai politik. Kedua, strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain. Ketiga, strategi partai politik dalam mengembangkan dan

memberdayakan organisasi politik secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Kebijakan umum partai ini dilakukan jauh sebelum pemberlakuan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu/Pemilukada, dan tidak ada perubahan meski Undang-undang ini telah dilakukan. Program-program tahunan dalam satu periode ini bisa dianggap sebagai strategi jangka panjang sebagaimana konsep yang dikemukakan. Adapun program tahunan tersebut selanjutnya di bagi menjadi empat item dalam satu periode:

1. Tahun konsolidasi partai
2. Tahun pembinaan
3. Tahun perluasan jaringan dan penokohan
4. Tahun kemenangan pemilu
5. Tahun evaluasi

Dari pemaparan di atas diketahui bagaimana perencanaan strategi PA untuk menyongsong kemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Walaupun tahun pertama sampai tahun ketiga program-program PA tidak langsung berkaitan dengan kampanye pemilu tetapi pelaksanaan program-program kepartaian tersebut mampu menjadi pijakan dasar buat tahun keempat partai sebagai tahun kemenangan pemilu, dan secara implisit program-program partai tiga tahun pertama merupakan bentuk lain dari komunikasi politik partai terhadap masyarakat umum.¹³

¹²Wawancara Rai Iskandar kota Langsa Hari Kamis Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

¹³Wawancara Maria Isnaini di Kota Langsa Hari Kamis Pada Tanggal 9 Agustus 2018.

Selanjutnya, berkaitan dengan perencanaan strategi komunikasi politik Partai Aceh dalam kemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa, ada beberapa alasan yang melatar belakangnya. Pertama adalah sebagai partai dakwah maka semua kebijakan partai termasuk strategi komunikasi politik dan pendekatan kemasyarakatan harus mencerminkan dakwah sebagai landasan filosofisnya. Sebagai partai dakwah maka PA mempunyai kewajiban untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat umum.¹⁴

3. Strategi Komunikasi Politik PA

Strategi komunikasi mempunyai fungsi menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Fungsi strategi komunikasi yang semacam ini yang diharapkan oleh partai PA untuk mencapai hasil optimal pada kemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa. Secara keseluruhan, partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategis dalam melakukan hubungan dengan masyarakat. Perencanaan ini menyangkut produk politik yang akan dibawa, *image* yang akan dimunculkan, program kampanye yang akan dilakukan dan strategi penggalangan massanya.

Dalam menyikapi tahun kedua kali dalam periode kepemimpinan PA, sebagai tahun kemenangan pemilu, partai membagi satu tahun ini menjadi empat program strategis. Empat program dalam tahun kemenangan pemilu ini bisa dikatakan sebagai strategi jangka pendek sebagai kelanjutan strategi

¹⁴Wawancara Maria Isnaini di Kota Langsa Hari Kamis Pada Tanggal 9 Agustus 2018.

jangkapanjang partai dalam satu periode. Adapun program-program dalam tahunpemenangan pemilu adalah:

1. PA mendengar. Yaitu kader PA turun ke bawah dalam artian terjunlangsung ke masyarakat untuk mendengar aspirasi, apa yang dikeluhkan,dan diinginkan masyarakat. PA mendengar ini merupakan saranakomunikasi partai dengan masyarakat atau konstituen langsung dari rumahke rumah atau disebut komunkasi *door to door*. Hal ini dianggap efektif,karena kader partai langsung mengetahui bagaimana respon dan tanggapanmasyarakat.¹⁵
2. PA mengajak. Karena PA tidak mungkin menangani semuapermasalahan dan tuntutan yang ada di masyarakat, maka PA mengajakorang-orang atau pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama untukmembantu mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat.
3. PA berbicara. Berbicara kepada masyarakat dengan berdasarkan *platform*partai sebagai tindak lanjut dari PA mengajak.
4. PA menang. Artinya dari program-program yang telah dilakukan olehkader PA di tengah-tengah masyarakat, maka diharapkan terwujudnyasimpati masyarakat. Bentuk dari simpati masyarakat inilah yangdiharapkan membantu tercapainya target PA dalam pemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa.¹⁶

¹⁵<http://www.partaiaaceh.com/2012/02/sejarah-partai-aceh.html>, diakses hari sabtu tanggal 27 januari 2018.

¹⁶<http://www.partaiaaceh.com/2012/02/sejarah-partai-aceh.html>, diakses hari sabtu tanggal 27 januari 2018.

Adapun strategi khusus dalam masa kampanye pemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa dandalam rangka menjalankan beberapa tahapan aksi pemenangan pemilu, PA menggunakan tiga strategi komunikasi politik. Pertama adalah *direct selling*, yaitukomunikasi langsung (*interpersonal*) kader PA dengan masyarakat dari rumahke rumah atau istilah lainnya *door to door*. Kedua yaitu komunikasi publik yangdilakukan oleh calon legislatif (caleg) dengan warga masyarakat yang biasanyaterdiri dari sekitar 200 sampai 300 orang, dan yang terakhir adalah membangunopini publik melalui media, baik media massa maupun media luar ruang.Pemaparan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Timses PA Kota Langsa,bahwa:

“Strategi khusus untuk kampanye dan dalam menjalankan beberapa tahapanaksipemenangan pemilu adalah pertama *direct selling* yaitu *door to door*.Itu dilakukan oleh seluruh kader, ini terbatas tapi efektif dan irit. Yangkedua adalah caleg melakukan dialog warga. Kalau caleg dialog wargabisa mengundang 200-300 orang, dan ini efektif tapi boros. Karena adamakan, minum, *sound system* dan pinjam tempat. Selanjutnya adalahdengan melakukan opini publik melalui media massa, kasarnya begini adaserangan udara dan serangan darat”¹⁷.

Strategi komunikasi *direct selling* atau *door to door* yang dilakukan olehpara kader PA kepada masyarakat merupakan bentuk komunikasi interpersonal.Komunikasi personal ini dilakukan antara orang-orang secara tatap muka, yangmemungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung,baik secara verbal ataupun nonverbal. Komunikasiinterpersonal ini, merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesanantara dua orang atau lebih dalam sebuah kelompok kecil dengan beberapa efekdan beberapa umpan balik seketika. Sedangkan fungsi-fungsikomunikasi antarpribadi adalah fungsi

¹⁷Wawancara Imran Rasyidi di Kota Langsa Hari Kamis Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Sebagai fungsi sosial, komunikasi antarpribadi ini mencakup tiga aspek yaitu: *Pertama*, manusia berkomunikasi untuk mempertemukan kebutuhan biologis dan psikologis; *kedua*, manusia berkomunikasi untuk memenuhi kewajiban sosial; *ketiga*, manusia berkomunikasi untuk mengembangkan hubungan timbal balik; *keempat*, manusia berkomunikasi untuk meningkatkan dan merawat kualitas diri sendiri. Pengambilan keputusan meliputi penggunaan informasi dan pengaruh yang kuat bagi orang lain. Jika dikaitkan dengan komunikasi maka terdapat dua aspek dari fungsi pengambilan keputusan yaitu: manusia berkomunikasi untuk membagi informasi dan manusia berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi interpersonal ini sangat penting karena memungkinkan proses komunikasi yang berlangsung dapat berjalan secara dialogis. Sehingga kader-kader PA yang melakukan pendekatan secara personal atau *door to door* kepada masyarakat bisa mengetahui bagaimana respon dan penilaian masyarakat terhadap partai PA.¹⁸

Dengan pendekatan komunikasi personal, kader-kader PA bisa langsung mengetahui respon balik dari masyarakat. Umumnya konseptualisasi tentang umpan balik adalah pesan balik yang disampaikan penerima kepada sumber, respon penerima kepada pesan sumber yang semula. Umpan balik merupakan perbedaan antara komunikasi satu arah dan dua arah, perbedaan yang akan terus dipandang tidak penting dalam memahami fenomena komunikasi manusia. Keberhasilan komunikasi ini akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon nonverbal dari masyarakat. Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk

¹⁸Wawancara Imran Rasyidi Di Kota Langsa Hari Kamis Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

mempengaruhi atau membujukorang lain, karena dalam komunikasi baik komunikator maupun komunikan dapat menggunakan kelima alat indera untuk mempertinggi daya persuasif pesan yang disampaikan. ¹⁹

Teori komunikasi Islam sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. *Qaulan baliga*, untuk kaum munafiq.
2. *Qaulan maisura*, untuk menolak permintaan tanpa menyakiti.
3. *Qaulan karima*, berkomunikasi dengan kedua orang tua.
4. *Qaulan ma'rufa*, berkomunikasi dengan fakir miskin.
5. *Qaulan layyina*, untuk pemimpin/penguasa yang dhalim (seperti Fir'aun).
6. *Qaulan sadida*, untuk mendidik anak (remaja).
7. *Qaulan syawira*, untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat kepentingan orang banyak (umum).
8. *Qaul az-zur*, perhatian dan modal utama setiap orang dalam berkomunikasi; dengan siapa saja, dalam keadaan apa saja, dan dimana saja, senantiasa selalu untuk menjauhi perkataan yang mengandung unsur kedustaan dan kebohongan. ²⁰

Tantangan dan peluang komunikasi Islami di era globalisasi adalah:

Pertama, dalam perspektif Islam, perlulah disadari bahwa informasi akan mempunyai arti hanya ia bila berada dalam kerangka pengetahuan masyarakat,

¹⁹Wawancara Imran Rasyidi Di Kota Langsa Hari Kamis Pada Tanggal 10 Agustus 2018.

²⁰ Muttaqien. *Prinsip-prinsip Komunikasi dalam Islam*. (Jurnal: Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga)

hanya bila komponen sasarannya selaras dengan aspek-aspek mutlak, substitusional, kultural, dan subjektif suatu masyarakat, barulah informasi dapat memberikan sumbangan positif kepada masyarakat itu sendiri. Keselarasan semacam ini akan terjadi bilamana negara-negara muslim menghasilkan informasi mereka sendiri dengan perlengkapan relevan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pembuat keputusan dan komunitas-komunitas mereka. Strategi informasi bagi dunia Muslim harus didasarkan pada kesadaran ini.

Kedua, pada masa depan komunikasi Islam itu dapat dikembangkan dengan memperhatikan tujuh konsep pokok Islam yang mempunyai kaitan langsung dengan penciptaan dan penyebaran informasi, yakni *tauhid* (keesaan), *'ilm* (ilmu pengetahuan), *hikmah* (kebijakan), *'adl* (keadilan), *ijma'* (konsensus), *syura* (musyawarah), *istislah* (kepentingan umum), dan *ummah* (komunitas Muslim sejagad). Seluruh konsep informasi ini dimaksudkan sebagai katalisator pembangunan dan perantara perubahan sosial.

Ketiga, peluang eksistensi komunikasi Islam pada masa depan tentu saja berangkat dari historis empirikal. Karena umat Islam telah memiliki pengalaman dan akar budaya masa lalu, menjadi sarana potensial untuk mengupdatekannya dan mengupgradenya dalam konteks kekinian.²¹

Ada beberapa contoh strategi komunikasi Islam yang dijalankan oleh PA adalah sebagai berikut:

²¹ Mohd. Rafiq. *Tantangan dan Peluang Komunikasi Islam pada era globalisasi informasi*. (Jurnal Analytica Islamica. 2003). Vol. 5, No. 2

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
2. Tidak menjelek-jelekkkan orang lain dalam masa kampanye.
3. Langsa yang menerapkan syariat Islam yang kaffah.
4. Safari subuh.
5. Gotong royong bersama.

C. Hambatan Strategi Komunikasi Partai Aceh Dalam Pemenangan Pilkada Tahun 2017

Meskipun tidak ada kendala yang begitu berarti dalam melakukan strategi pemenangan Partai Politik Aceh dalam Pemilu Kepala Daerah pada tahun 2017 di Kota Langsa, akan tetapi tetap ada kendala yang dirasakan Partai Aceh dalam memenuhi kuota keterwakilannya di pemerintahan. Dalam masa kampanye pemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa dan dalam rangka menjalankan beberapa tahapan aksi pemenangan pemilu, PA menggunakan tiga strategi komunikasi politik.

Pertama adalah *direct selling*, yaitu komunikasi langsung (*interpersonal*) kader PA dengan masyarakat dari rumah ke rumah atau istilah lainnya *door to door*. Itu dilakukan oleh seluruh kader, ini terbatas tapi efektif dan irit. Strategi komunikasi *direct selling* atau *door to door* yang dilakukan oleh para kader PA kepada masyarakat merupakan bentuk komunikasi interpersonal. Hambatan dalam strategi ini menimbulkan sarat *money politic*, dan menjadi target pantauan dari lawan partai politik lainnya.²²

²²Hasil Observasi Penulis di Parpol Langsa Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018

Kedua yaitu komunikasi publik yang dilakukan oleh calon legislatif (caleg) dengan warga masyarakat yang biasanya terdiri dari sekitar 200 sampai 300 orang. Kalau caleg dialog warga bisa mengundang 200-300 orang, dan ini efektif tapi boros karena ada makan, minum, *sound system* dan pinjam tempat. Adapun hambatannya caleg ataupun kader yang ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin akan banyak menghabiskan dana untuk masa kampanye ataupun perkenalan diri kepada masyarakat.

Terakhir adalah membangun opini publik melalui media, baik media massa maupun media luar ruang. Pemaparan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Timses PA Kota Langsa, bahwa selanjutnya adalah dengan melakukan opini publik melalui media massa, kasarnya begini ada serangan udara dan serangan darat''. Adapun hambatannya adalah banyak memakan biaya untuk operasional tersebut dan harus bersaing dalam hal daya tarik visi misi kandidat tersebut terhadap masyarakat untuk memilih calon pemimpin kepala daerah tersebut.²³

Adapun tata cara berpolitik Patrai Aceh dari sisi positifnya adalah: sangat penting untuk menyegarkan kembali kaidah-kaidah berpolitik dalam Islam. *Pertama*: kaidah *as-siyâdah li asy-syar'i*; kedaulatan di tangan hukum syariah (al-Quran dan Sunnah). Kaidah inilah yang paling utama. Seluruh aktivitas politik kita seharusnya berpedoman pada hukum syariah. Apa saja yang dilarang Allah Swt. harus kita tinggalkan. Sebaliknya, apa yang Dia diperintahkan harus dengan segera kita laksanakan.

²³Hasil Observasi Penulis di Parpol Langsa Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018

Terikat dengan hukum syariah adalah prinsip penting. tidak boleh membuat kita toleran dengan pelanggaran hukum syariah atau menjadi pembenaran untuk menunda kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban dan menjauhkan larangan harus sesegera mungkin, tidak boleh ditunda-tunda, atau dilaksanakan bertahap. Kedua, di mana ada hukum syariah di situ ada kemaslahatan. Kemaslahatan (kebaikan) adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita menjalankan hukum syariah. Sebaliknya, kemadaratan (bahaya, keburukan) akan kita peroleh kalau kita melanggar hukum syariah. Bukan sebaliknya.

Menjadikan kemaslahatan sebagai panglima dalam politik sangat berbahaya. Apapun bisa dibenarkan dengan alasan kemaslahatan meskipun bertentangan dengan hukum syariah. Kalau kita bergabung dengan pemerintah sekular yang tidak menjalankan syariah Islam, *kan* ada manfaatnya: kita bisa mendapat fasilitas ekonomi, beberapa kepentingan umat Islam bisa kita capai, dan lain-lain. Pernyataan seperti ini tertolak dalam pandangan hukum syariah. Sebab, kalau Allah sudah melarang kita, berarti pasti ada madaratnya. Lagipula, tidak ada kebaikan hakiki, termasuk untuk kepentingan umat, kecuali dengan berhukum pada hukum syariah.

Ketiga: tidak boleh menghalalkan segala cara. Ini sangat berbeda dengan kaidah berpolitik dalam sistem kapitalis. Dalam prinsip politik kapitalis, segala cara boleh dilakukan asal bisa mencapai tujuan. Tidak heran kalau dalam iklim berpolitik seperti ini, tipu-menipu, pengkhianatan serta saling menjatuhkan dan menghancurkan dalam berpolitik menjadi biasa,

Dalam Islam, seluruh perbuatan kita harus terikat dengan hukum syariah baik dalam hal pemikiran (*fikrah*), tujuan (*ghâyah*), metode (*tharîqah*) sampai pada tingkat strategi yang teknis (*uslûb*). Kemenangan dari Allah Swt. hanya akan kita peroleh kalau kita berhukum dengan hukum syariah. Mustahil dengan strategi yang melanggar hukum syariah kemenangan hakiki berupa tegaknya kekuasaan Islam untuk menjalankan syariah Islam secara *kâffah* (menyeluruh) akan tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan padabab sebelumnya yang telah penulissampaikan mengenai Strategi Komunikasi PolitikIslami Partai Aceh Dalam Pemenangan Pilkada 2017 (Study Kasus Kota Langsa), maka penulismengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partai Aceh sebagai partai yang menjangkau seluruh ulama, para tokoh pendidikan dan masyarakat dengan dakwah, maka strategi yang dijalankannya sudah tentu tidak terlepas dari karakter dakwah itu sendiri, di mana dakwah yang dilakukan adalah dengan cara berkesinambungan di masyarakat.Strategi komunikasi politik PA dalam pemenangan pilkada 2017 di Kota Langsa dilakukan secara terencana. Proses perencanaan ini merupakan hasil dari mekanisme yang ada di partai terutama yang dilakukan oleh DPP PA. Komunikasi efektif yang dilakukan oleh partai politik berdampak signifikan pada perolehan suara partai dalam pemilukada, karenaada faktor lain yang turut mempengaruhinya.Beberapaprogram dalam tahun pemenangan pemilu ini bisa dikatakan sebagai strategi jangka pendek sebagai kelanjutan strategi jangka panjang partai dalam satu periode. Adapun program-program dalam tahun pemenangan pemilu adalahPA mendengar, PA mengajak, PA berbicara dan PA menang.

2. Adapun hambatan dalam melakukan strategi pemenangan Partai Politik Aceh dalam Pemilu Kepala Daerah pada tahun 2017 di Kota Langsa adalah Pertama adalah *direct selling*, yaitu komunikasi langsung (*interpersonal*) kader PA dengan masyarakat dari rumah ke rumah atau istilah lainnya *door to door*. Hambatan dalam strategi ini menimbulkan *sarat money politic*, dan menjadi target pantauan dan lawan partai politik lainnya. Kedua yaitu komunikasi publik yang dilakukan oleh calon legislatif (*caleg*) dengan warga. Adapun hambatannya *caleg* ataupun kader yang ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin akan banyak menghabiskan dana untuk masa kampanye ataupun perkenalan diri kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah membangun opini publik melalui media, baik media massa maupun media luar ruang. Adapun hambatannya adalah banyak memakan biaya untuk operasional tersebut dan harus bersaing dalam hal daya tarik visi misi kandidat tersebut terhadap masyarakat untuk memilih calon pemimpin kepala daerah tersebut.

B. Saran

1. Dalam merumuskan suatu strategi komunikasi politik perlu dilakukan analisis masalah secara mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal partai (tidak cukup hanya berdasar *survey* saja) guna merencanakan strategi partai yang betul-betul efektif dan efisien sesuai dengan tujuan partai.
2. Untuk menentukan penggunaan media secara tepat perlu dilakukan riset media baik pra maupun pasca penggunaan media, sebagai bahan evaluasi partai

untuk mengetahui sejauh mana keefektifan dan kontribusi media terhadap perolehan suara partai.

3. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang populis dan cenderung menguntungkan partai politik tertentu perlu diwaspadai dan dikaji oleh PA untuk merumuskan strategi komunikasi politik partai sebagai *counterattack* terhadap strategi lawan politik.
4. Bagi peneliti lain yang berminat untuk memperdalam kajian ini maka dapat melakukannya dengan cakupan yang lebih luas agar memperoleh pemahaman yang mendalam tentang komunikasi politik partai, karena penulis menyadari akan keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya sehingga penelitian ini hanya dilakukan dengan strategi studi kasus tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Furqon, *Strategi Komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Secara Ekspresi Simbolik Di Media Sosial Jelang Pemilu 2014*, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2014.
- AffanRamli, *Adat berdaulat: melawan serbuan kapitalisme di Aceh*, 2015.
- Ali Syafaat, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta: Raja GrafinsoPersada, 2008.
- AloLilweri, *Strategi komunikasi masyarakat*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Anwar Arifin, *Ilmu komunikasi: sebuah pengantar ringkas*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- AsepSuepulahMuhtadi, *Kampanye politik*, Jakarta: Humaniora, 2008.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Cheppy Hari Cahyono, *EnsiklopediPolitika*, Universitas Michigan: Usaha Nasional, 1982.
- Dalam jurnalnya Erick Wb Napitupulu, *Strategi Komunikasi Politik Dan Pemenangan Pemilu (studi kasus strategi komunikasi politik hulman sitorus, SE dan Drs. Koni ismail siregar pada masa kampanye pemilihan umum kepala daerah pematangsiantar 2010*.
- DawamRaharjo, *KrisisKapitalisme Global IlusiatauRealistis?*, Jakarta: YayasanObor, 2006.
- Erwin Parengkuan, *StrategiTaktisKomunikasiBerdasarkanKepribadian*, Jakarta: GramediaPustakUtama, 2017.
- Hasil Observasi Penulis di Parpol Langsa Hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018.
- Hayatullah Khumaini, "Harapan Baru Aceh Di Pemilu 2017," <http://id.acehinstitute.org/index.php>, akses 02 Mei 2017.
- HusainiUstman, *MetodologiPenelitianSosial*Jakarta: BumiAksara, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, jakarta:sekretariat jendral dankepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2006.

- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihankepaladaerahlangsung: filosofi, sistem, danproblemapenerapan di Indonesia*, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2005.
- Lawrence R. Jauch & william F Glueck, *Menagemen Strategis dan kebijakan perusahaan*, Jakarta : Erlangga 1988.
- Mardalis, *MetodePenelitian*, Jakarta: BumiAksara, 2008.
- Miriam Budiarmo, *Dasar-dasarIlmuPolitik*, Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2000.
- Muhammad Anwar, *Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Elektabilitas Pada Pilkada 2015 Di Kota Samarinda*.Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nazir, *MetodologiPenelitianKualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2005.
- Nur Ahmad El Aufa, berjudul *Strategi Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilu 2014*, Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2014.
- Rakhmad Fadli Zain “*Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Politik (Dalam Proses Perdamaian)*” skripsi program studi ilmu politik universitas indonesia tahun 2009.
- Rakhmad Fadli Zain “*Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Menjadi Partai Politik (Dalam Proses Perdamaian)*” skripsi program studi ilmu politik universitas indonesia tahun 2009.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Riduwan, *AnalisisStatistika Penelitian* Jakarta: UI Press. 2010.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- SaifuddinAzwar, *MetodePenelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005.
- Sigmund Neuman, *modern politicalparties*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Sugiono, *MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R & GD*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- SuhasimiArikunto, *Prosedurpenelitian suatu PendekatanPraktek. Cet IX*, Jakarta: RinekaCipta, 1993.

Syarbaini, Sosiologidan ;Politik, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 10.

UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat 2.



Wawancara Terhadap Furkan Ibrahim Sekretaris Partai Aceh Kota Langsa



Wawancara Terhadap Basri Ketua DPS Langsa Barat Kota Langsa



Wawancara Terhadap NurdinJunedKetua Tim Pemenangan Partai Aceh

Kota Langsa



Wawancara Terhadap Bapak Dr. Marzuki Hamid Wakil Walikota Terpilih
Partai Aceh Kota Langsa



Wawancara Terhadap Bapak Dr. Marzuki Hamid Wakil Walikota Terpilih Partai
Aceh Kota Langsa

